

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Nama : Edi Erawadi, S.ST
NIP : 19690902 199102 1 002
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tugas : Koordinator Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
2. Nama : Sri Anggraini, S.E
NIP : 197908042009122003
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tugas : Menyusun rencana kegiatan penarikan dana, membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak

penyedia barang/jasa dan menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menertibkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum untuk APBN dan APBD

3. Nama : Viko Darma SH, M.Si
NIP : 198312022010121006
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Tugas : Mengkoordinir pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

4. Nama : Yulfia Laheri, S.E
NIP : 19780730 200710 2 002
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

Tugas : Melakukan Pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar, melakukan pembebanan tagihan kepada negara dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)

5. Nama : Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si
NIP : 19790705 201212 1 006
Pangkat : Penata (III/c)

Jabatan : Sebagai Bendaharawan Pengeluaran
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Solok

Tugas : Mengkoordinir dan menyusun SPJ
proses pengeluaran Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok untuk APBN dan
APBD

6. Nama : Iin Maryanti, S.H

NIP : 19950921 202012 2 013

Pangkat : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Sebagai Staf Pengelola Keuangan
Anggaran 076 Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Solok

Tugas : Membantu Penyusunan SPJ proses
pengeluaran Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok

7. Nama : Roza Adha

NIP : 19801020 200701 2 004

Pangkat : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Sebagai Staf Pengelola Keuangan
Anggaran 076 Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Solok

Tugas : Membantu Penyusunan SPJ proses
pengeluaran Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok

KEDUA : Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Solok Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan dan
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok.

KETIGA : Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 menyampaikan laporan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendaharawan Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024;
2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharawan Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024.
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendaharawan Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembayaran Honorarium Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendaharawan Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota

Solok;

- 5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024; dan
- 6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Masa kerja Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2024 selama 3 (tiga) bulan, mulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

KEENAM : Penanggungjawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi Honorarium setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Rp 3.010.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen	: Rp 2.920.000,-
Pejabat Penandatangan SPM	: Rp 1.250.000,-
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	: Rp 680.000,-
Bendahara Pengeluaran	: Rp 1.090.000,-
Staff Pengelola Keuangan	: Rp 810.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 9 Oktober 2024

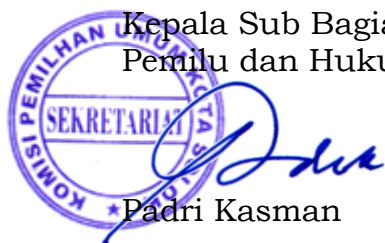
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM EDI ERAWADI
KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman